



Strategi Optimalisasi Aset Idle Daerah Provinsi Jawa Tengah

Shara Meilyanti Anartany^{1✉}, Deky Aji Suseno²

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2018

Disetujui Desember 2018

Dipublikasikan Februari 2018

Keywords:

Strategy, Optimization, Idle Assets, Analytical Hierarchy Process

Abstrak

Aset daerah yang digunakan oleh pengguna barang, tidak semua dimanfaatkan dengan baik. Belum termanfaatkannya aset menunjukkan bahwa masih perlu ada optimalisasi untuk memanfaatkan aset tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab aset idle daerah serta menentukan strategi untuk mengoptimalkan aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan AHP (analisis hirarki proses). Informan dari penelitian ini terdiri dari 8 keyperson yang terdiri dari unsur akademisi/peneliti dan instansi dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian dengan menggunakan AHP yaitu, kriteria pertama faktor sewa, yang kedua faktor sumber daya manusia, yang ketiga faktor anggaran, selanjutnya faktor legal audit, dan yang terakhir faktor regulasi. Alternatif program yakni dengan memperhatikan nilai sewa berdasarkan kondisi aset. Selanjutnya yaitu dengan menambah sumber daya manusia dalam pengelolaan aset serta meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan aset.

Abstract

The assets of the area used by the user objects, not all put to good use. Not yet benefits assets show that still need to be there to take advantage of asset optimization. The purpose of this research is to analyze the factors cause the idle assets area and determine strategies to optimize asset idle area of Central Java province. This type of research is descriptive qualitative with data analysis technique used in this research is descriptive and analysis technique AHP (analysis Hierarchy process). Informants from this research consists of 8 keyperson consisting of academician and government institution surroundings of Central Java province. The results of research using the AHP first criteria i.e., the lease factor, the second factor in human resources, the third factor in the next budget, audit, legal factors and the last regulatory factors. Alternative program namely with regard for the value of the lease based on the condition of the assets. Next is to increase human resources in the management of the assets as well as increasing human resource in the management of assets.

PENDAHULUAN

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dan diubah kembali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peningkatan kemandirian sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam rangka mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mahmudi 2010:18). Peningkatan ini bisa berupa peningkatan pendapatan asli daerah yang sudah ada maupun menggali sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik juga mempengaruhi perubahan pengelolaan aset negara. Yang semula di kelola pemerintah pusat dengan adanya perubahan ini maka pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola aset daerahnya. Model generik telah dikembangkan dan digunakan untuk menganalisis kapasitas lahan idle (Santana, et al., 2017)

Aset daerah merupakan salah satu jenis sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya apabila pengelolaannya dilakukan secara tepat. Dalam pengelolaan aset daerah terdapat beberapa tahap, yaitu: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah, pengelola aset daerah harus mengikuti prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas yang dipenuhi paling tidak meliputi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas

proses, akuntabilitas kebijakan (Soleh dan Heru 2010: 151-154).

Tahap tersebut bertujuan agar penggunaan aset daerah sesuai dengan kebutuhan dari daerah. Selain itu pengelolaan aset tersebut bertujuan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Soleh dan Heru 2010:157-158). Pengelolaan aset bisa dilakukan dengan penggunaan aset dan pemanfaatan aset daerah. Penggunaan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi yang bersangkutan.

Sedangkan pemanfaatan bisa dengan cara sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, kerjasama penyediaan infrastruktur. Pengelolaan aset daerah tidak selalu berjalan lancar. Hal tersebut sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 yaitu masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah yang ditunjukan dengan masih banyaknya aset idle yaitu sebanyak 45 aset idle. Aset idle daerah adalah aset yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan dan fungsi lembaga (PMK Nomor 71/PMK.06/2016). Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, berikut adalah data aset idle pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2016:

Tabel 1. Aset Idle Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Nama Instansi	Jumlah Aset Idle (item)	Ratio (%)
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	11	24.44
Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	3	6.66
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	6	13.33
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	15	33.33
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	5	11.11
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	4	8.88
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	1	2.22
Jumlah	45	100

Sumber: BPKAD, 2017

Berdasarkan tabel 1, jumlah aset idle daerah milik Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2016 sebanyak 45 aset. Jumlah tersebut adalah hasil verifikasi aset idle yang dilakukan oleh instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Jenis aset idle tersebut berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan oleh pengguna barang. Aset idle yang dimiliki perlu dioptimalkan agar bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan aset daerah. Penetapan aset daerah menjadi aset daerah idle harus memenuhi beberapa kriteria yaitu: barang milik daerah dalam penguasaan pengguna barang yang tidak digunakan dan yang tidak digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Aset daerah idle yang berada dalam penguasaan pengguna barang harus dikembalikan kepada pengelola barang. Tujuannya agar pengelola barang bisa memanfaatkan aset tersebut sehingga tidak ada aset idle yang mengganggu.

Menurut Jusmin (2013) ada beberapa faktor yang menyebabkan aset daerah idle. Salah satu penyebab aset daerah idle adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang atau aset. Ini menyebabkan pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah dan menentukan strategi optimalisasi aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah yang sesuai untuk mengatasi permasalahan terkait aset idle daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari informan kunci (keyperson) yaitu dari pihak instansi pemerintah

dan akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelaah studi-studi dokumen yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. 1) Observasi yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan cara survey ke lapangan. 2) Wawancara yaitu melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak instansi yang berwenang mengenai pelaksanaan penyerapan anggaran instansi. 3) Kuesioner adalah mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan tertulis berupa kuesioner AHP kepada keyperson untuk dijawab. 4) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa data-data dari laporan bulanan penyerapan anggaran yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis hirarki proses (AHP). Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab tidak optimalnya aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka diperoleh data-data mengenai permasalahan tersebut. Sedangkan metode AHP untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu menentukan strategi optimalisasi aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kuesioner yang diberikan kepada keyperson yang telah ditentukan dan memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengatasi permasalahan terkait optimalisasi aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan mengenai kondisi dan permasalahan yang masih terjadi pada

pengelolaan aset daerah yang berakibat munculnya aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa faktor penyebab aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu: faktor legal audit, faktor sumber daya manusia, faktor regulasi, faktor sewa dan faktot anggaran. Faktor legal audit terjadi karena aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah digunakan oleh warga secara ilegal. Hal tersebut menyulitkan untuk pemanfaatan aset sehingga menjadikan aset tersebut dalam kondisi idle.

Faktor sumber daya manusia terjadi karena sumber daya manusia di bidang pengelolaan aset daerah belum sesuai dengan bidang keahlian. Hal tersebut menyulitkan untuk proses pengelolaan aset karena ketidak pahaman akan pengelolaan akan ilmu yang dikuasai. Selain itu karena terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan aset. Faktor selanjutnya yaitu regulasi. Selama ini regulasi yang diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan aset dilapangan. Sedangkan dasar pengelolaan aset bersumber dari regulasi yang telah diterbitkan.

Faktor sewa terjadi karena tarif sewa yang ditentukan berdasarkan lokasi aset. Padahal kondisi aset juga mempengaruhi proses sewa aset. Kondisi aset yang tidak baik sedangkan nilai sewa aset yang tinggi dianggap tidak sesuai. Faktor anggaran disebabkan kurangnya anggaran untuk pengelolaan aset mengakibatkan pengelolaan aset tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena anggaran dibutuhkan untuk pemeliharaan aset agar aset bisa menarik pihak yang akan memanfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil perhitungan AHP menunjukan bahwa kriteria aspek sewa memiliki nilai bobot tertinggi yaitu 0.542. Kriteria berikutnya adalah sumber daya manusia dengan nilai bobot 0.146. Kemudian kriteria anggaran dengan bobot 0.114. Kriteria legal audit dengan nilai bobot 0.109. Dan yang terakhir adalah kriteria regulasi dengan nilai bobot 0.089. dan inconsistency ratio sebesar 0.09. nilai tersebut menjelaskan bahwa jawaban dari para keyperson konsisten dan bisa diimplementasikan sebagai kebijakan baru untuk optimalisasi aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah. berikut:

Tabel 2. Kriteria Optimalisasi Aset Idle Provinsi Jawa Tengah

No	Program	Nilai Bobot	Keterangan
1	Berbasis Legal Audit	0.109	Inconsistency Ratio = 0.09
2	Berbasis SDM	0.146	
3	Berbasis Regulasi	0.089	
4	Berbasis Sewa	0.542	
5	Berbasis Anggaran	0.114	

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Hasil AHP pada tabel 1 diperoleh dari keyperson yang telah dipilih. Hasil olah data AHP digunakan untuk menentukan faktor mana yang menjadi prioritas dan memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang harus diperbaiki atau dikembangkan untuk optimalisasi aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah. Langkah selanjutnya yakni faktor-faktor yang menjadi kriteria dari yang paling prioritas hingga yang tidak prioritas akan diuraikan ke dalam sebuah alternatif-alternatif dari masing-masing faktor.

Dalam pengoptimalan aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah aspek sewa merupakan aspek yang paling penting. Dikarenakan dalam pengelolaan aset daerah tidak semua aset dalam kuasa pengguna barang bisa dimanfaatkan untuk tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut karena aset dalam kuasa pengguna barang tidak sesuai untuk program yang direncanakan oleh pengguna barang. Sehingga untuk memanfaatkan aset agar tidak dalam kondisi idle, pengguna barang menyewakan aset tersebut kepada pihak ketiga. Riyono (2013) menyebutkan bahwa penyewaan

merupakan penyerahan hak penggunaan/pemanfaatan kepada pihak pengusaha, dalam hubungan sewa menyewa tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

Selain aspek sewa, aspek sumber daya manusia juga memegang peranan penting. Selama ini sumber daya manusia yang dimiliki pengguna barang untuk mengelola aset belum maksimal. Hal tersebut karena sumber daya manusia yang dimiliki bukan dari ahli dalam pengelolaan aset. Sehingga perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan aset dan penambahan sumber daya manusai dalam pengelolaan aset. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan aset bisa dengan cara mengadakan pelatihan dalam pengelolaan aset daerah. selain dengan peningkatan sumber daya manusia, hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan menambah sumber daya manusia sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Raharja, et al (2015) sumber daya manusia yang kurang berkualitas merupakan salah satu penghambat untuk dapat melaksanakan pengelolaan aset daerah yang baik. Pengelolaan aset daerah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut tentu perlu dukungan yang cukup agar kebijakan bisa tercapai.

Aspek lain yang juga bisa mengoptimalkan aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah adalah aspek anggaran. Alternatif strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menambah anggaran untuk peremajaan aset atau memasarkan aset kepada pihak ketiga. Selama ini aset dalam kuasa pengguna barang, peremajaannya menggunakan dana APBD. Sedangkan aset idle dalam kuasa pengguna barang tidak hanya satu namun ada beberapa. Sedangkan tidak dibenarkan bahwa dana APBD hanya untuk mengelola aset idle dalam kuasa pengguna barang. Salah satu faktor aset dalam kuasa pengguna barang dalam kondisi idle dikarenakan tidak adanya anggaran yang cukup untuk mengelola aset sehingga pihak pengguna barang melakukan pembiaran terhadap aset yang

dalam penguasaan pengguna barang. Setelah aset tersebut dilakukan peremajaan, maka akan memudahkan untuk memasarkan kepada pihak ketiga. Aset tersebut akan sulit ditawarkan kepada pihak ketiga apabila kondisi aset memerlukan peremajaan dengan biaya yang tinggi. Aji dan Sunarto (2012) menyebutkan bahwa anggaran menjadi kebutuhan internal untuk optimalisasi program yang memiliki kepentingan dengan kepentingan publik. Hal tersebut karena anggaran diperlukan untuk biaya operasional seperti pemeliharaan peralatan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Selanjutnya adalah aspek legal audit. Legal audit termasuk kedalam pengamanan dan pemeliharaan aset daerah. Kebijakan yang bisa diterapkan dalam aspek legal audit adalah melegalkan kepemilikan aset secara fisik dan yuridis. Hal yang bisa dilakukan untuk menunjang kebijakan tersebut adalah dengan melakukan plangisasi terhadap aset yang dalam kondisi idle. Plangisasi bertujuan untuk menetapkan aset milik pemerintah agar tidak digunakan oleh warga secara ilegal. Selain dengan melegalkan aset secara fisik dan yuridis, kebijakan yang diambil adalah dengan monitoring pengelolaan aset secara terjadwal. Monitoring bertujuan agar pengguna barang yang mengelola barang daerah memiliki program yang berlanjut sehingga potensi aset idle bisa berkurang. Mardiasmo (2012) menyebutkan bahwa legalitas menjadi faktor dalam pengelolaan aset daerah. Hal tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah sebagai pemilik aset yang sah. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi mencakup komitmen, tingkat pengetahuan, kesediaan, kepribadian, kemampuan dan rasa pertanggungjawaban.

Aspek penting lainnya dalam pengoptimalan aset idle daerah Provinsi Jawa Tengah adalah aspek regulasi. Karena informasi yang dikeluarkan tidak semua dipahami dengan baik oleh aparat yang mengelola aset daerah. Selain itu perlu adanya ketepatan informasi dalam penyampaian informasi kebijakan pengelolaan aset daerah. Regulasi bertujuan agar dalam pengelolaan aset daerah, pengguna barang memiliki dasar yang jelas sehingga tidak asal

dalam mengelola barang. Hasbi (2011) menyebutkan bahwa regulasi tentang kejelasan aset salah satu faktor dalam pengelolaan aset daerah. Regulasi yang dimaksud adalah perlu adanya kebijakan hukum yang komprehensif. Hal tersebut karena tidak adanya panduan untuk proses pengelolaan yang selanjutnya

Selama ini dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah menetapkan kebijakan tanpa melihat kondisi aset yang sebenarnya. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan aset tidak menjadi optimal karena tidak semua regulasi yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain perubahan regulasi dengan melihat kondisi aset, regulasi untuk menunjang pengoptimalan aset idle adalah dengan merubah regulasi untuk menarik minat investor. Sebelumnya dijelaskan bahwa dalam pengelolaan aset memerlukan pihak ketiga agar aset bisa optimal. Selama ini aset yang dalam kondisi idle disebabkan terkendala regulasi yang diterbitkan. Dalam pengelolaan aset melalui sewa, para investor menganggap waktu menyewa aset selama 5 tahun belum bisa menutup biaya yang sudah dikeluarkan. Sehingga minat untuk menyewa aset daerah berkurang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) faktor sewa dan sumber daya manusia menjadi penyebab aset daerah menjadi aset idle. Faktor sewa disebabkan karena tarif sewa yang ditentukan berdasarkan lokasi aset. Dan faktor sumber daya manusia disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengelola aset tidak sesuai. (2) Strategi optimalisasi aset idle daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang pertama yaitu dengan menentukan tarif sewa berdasarkan kondisi dan lokasi aset. Yang kedua dengan menambah sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat beberapa saran yang bisa diberikan: (1) Menyewakan aset kepada pihak lain agar bisa

menambah pendapatan dengan tarif sewa berdasarkan kondisi aset sebagai dasar penentuannya. (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset dengan mengadakan pelatihan rutin bagi pengelola aset daerah. Tujuannya agar aset yang dikelola bisa dioptimalkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- .Aji, Deky Suseno. St Sunarto. 2012. Strategi Kebijakan Pengelolaan Polder Tawang Sebagai Pengendali Banjir Dengan Pendekatan Analysis Hierarchy Process (AHP). *Jejak*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012.
- Hasbi, Muhammad Hanis. Et al. 2011. The Application Of public Asset Management In Indonesian Local Government. *Journal of Corporate Real Estate*. Vol 13 no 1, 2011. Emerald Group Publishing Limited 1463-001X
- Jusmin. 2013. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kota Baubau. Tesis. FEB UGM. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo, Diaswata. Charles Sampford. Why Stagnant? The Scenes In Indonesia's Refomed State Asset Management Policies. In *14th International Schumpeter Society Conference (ISS)*, 2-5 July 2012, Brisbane, QLD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementrian Negara/Lembaga.
- Raharja, Mega. Et al. 2015. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol 3 No 1.
- Riyono, Sugeng. 2013. Pemanfaatan Aset Daerah (Studi tentang pola kemitraan aset tanah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *DIA Jurnal Administrasi Publik*. Desember 2013, Vol 11, No. 2. Hal 237 – 245.
- Santana, A, et al., 2017. Costing models for capacity optimization in Industry 4.0: Trade-off between used capacity and operational

efficiency. *Procedia Manufacturing*, Volume 13,
Pages 1183-1190

Soleh, Chabib. Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia.
Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23
Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*.